

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF KEKERASAN DI SMPN 1 DENPASAR

Aisyah Dilla Asyifa Aditya

Ainur Rifqi

Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

aisyah.21035@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan mengenai peran kepala sekolah dalam implementasi pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) sebagai tindakan preventif kekerasan di SMPN 1 Denpasar. Menggunakan metode kualitatif yang informan kunci Kepala SMPN 1 Denpasar dan informan lainnya yaitu Koordinator TPPK, Guru Bimbingan Konseling, dan Siswa. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data yaitu teknik uji kredibilitas (triangulasi sumber dan teknik), transferabilitas, dependabilitas, serta konfirmabilitas. Teknik analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala SMPN 1 Denpasar sebagai edukator, (a) Pembinaan mental: mengingatkan siswa tidak melakukan kekerasan dan pelaporan, layanan konseling, kerahasiaan identitas, dan peran dalam role play. (b) Pemberian nasihat: saat upacara, rapat, dan keliling kelas dengan pendekatan santai-tegas. (c) Pembinaan fisik: kegiatan baris – berbaris, pramuka, outbound, senam rutin, dan ekstrakurikuler. (d) Kolaborasi tim: bekerja sama dengan psikolog, dokter UKS, dan puskesmas. Peran kepala SMPN 1 Denpasar sebagai manajer, (a) Perencanaan: penunjukan koordinator TPPK dan budaya anti-kekerasan. (b) Pengorganisasian: rapat, kegiatan parenting, dan pendampingan siswa. (c) Pelaksanaan: mendukung SIGAP, ruang Hati, pelatihan, dan MoU dengan pihak eksternal. (d) Evaluasi: hasil audit, perbaikan fasilitas, dan evaluasi program. Dampak implementasinya terhadap iklim sekolah dan kasus kekerasan di sekolah yaitu, (a) Dampak dalam keterbukaan siswa: siswa berani melapor pada sistem pelaporan anonim SIGAP. (b) Dampak dalam iklim sekolah: diskusi guru siswa sudah berani melapor dan mengakses SIGAP, tindak lanjut laporan kekerasan, dan transparansi kasus kekerasan.

Kata Kunci : Peran Kepala Sekolah, TPPK, Tindakan Preventif Kekerasan.

Abstract

This research aims to know, analyze and describe regarding the role of the principal in implementing the formation of a violence prevention and handling team (TPPK) as a preventive measure of violence at SMPN 1 Denpasar. Using a qualitative method, the key informant is the Head of SMPN 1 Denpasar and other informants are the TPPK Coordinator, Counseling Guidance Teacher, and Students. Data collection techniques are interviews, observations, and documentation studies. Data validity test techniques are credibility test (triangulation of sources and techniques), transferability, dependability, and confirmability. Data analysis techniques are data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the role of the head of SMPN 1 Denpasar as an educator, (a) Mental coaching: reminding students not to commit violence and reporting, counseling services, identity confidentiality, and roles in role play. (b) Giving advice: during ceremonies, meetings, and around the class with a relaxed-firm approach. (c) Physical development: marching, scouting, outbound, routine gymnastics, and extracurricular activities. (d) Team collaboration: working with psychologists, UKS doctors, and community health centers. The role of the head of SMPN 1 Denpasar as a manager, (a) Planning: appointment of the TPPK coordinator and anti-violence culture. (b) Organizing: meetings, parenting activities, and student mentoring. (c) Implementation: supporting SIGAP, Hati room, training, and MoU with external parties. (d) Evaluation: audit results, facility improvements, and program evaluation. The impact of its implementation on school climate and cases of violence in schools are, (a) Impact on student openness: students dare to report on the SIGAP anonymous reporting system. (b) The impact on school climate: teacher discussion, students have dared to report and access SIGAP, follow-up of violence reports, and transparency of violence cases.

Keywords : Role of The Principal, TPPK, Preventive Measures of Violence

PENDAHULUAN

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) telah merilis data yang menunjukkan bahwa, antara bulan Januari dan Februari 2024, tercatat ada 1.993 masalah kekerasan anak. Angka ini dapat lantas meningkat, apalagi mengingat insiden kekerasan pada 2023. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PPA), ada 3.547 laporan insiden kekerasan anak pada tahun 2023. Sedangkan itu, ada 2.355 kasus kekerasan perlindungan anak dari Januari sampai Agustus 2023, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dari banyaknya angka tersebut, 861 kasus berlangsung pada satuan pendidikan. Secara rinci, sebanyak 487 akibat kekerasan seksual, 87 kasus akibat perundungan, 236 akibat korban kekerasan fisik maupun psikis, 27 kasus akibat penyediaan fasilitas pendidikan, dan 24 akibat kebijakan. Sementara itu, 2.325 insiden kekerasan fisik terhadap anak dilaporkan di 2023, berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Berdasarkan informasi dari Simfoni-PPA, data kasus kekerasan di Bali mencapai 296 kasus dengan 251 korban Perempuan dan 64 korban laki – laki serta Kota Denpasar menjadi kota tertinggi kasus kekerasan di Bali dengan mencapai 126 kasus. Kasus kekerasan berdasarkan tingkat pendidikan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan peringkat kedua kasus tertinggi setelah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan mencapai 75 kasus dengan jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian yaitu 11 kasus di sekolah. Jumlah insiden kekerasan pada sekolah di Indonesia dapat dilihat dari survei tersebut.

Dalam tindakan preventif dan mengatasi kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek) sudah mengesahkan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Dengan memasukkan siswa, guru, dan tenaga kependidikan ke dalam cakupan sasarannya, Permendikbud PPKS dirancang untuk meningkatkan upaya preventif dan penindakan kekerasan dalam lingkup pendidikan. Kebijakan tersebut bertujuan agar warga satuan pendidikan terlindungi dari berbagai tindak kekerasan. Satuan pendidikan diwajibkan oleh peraturan ini untuk membuat Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), dan pemerintah daerah di provinsi, kabupaten, dan kota diwajibkan untuk membuat Satuan Tugas. Berdasarkan tata cara Pembentukan Tim TPPK sesuai Permendikbud Ristek No. 46/2023, TPPK diangkat dan disahkan oleh kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Satuan pendidikan bertanggung jawab di bidang tata kelola termasuk membuat kebijakan dan prosedur, mengimplementasikan pembelajaran tanpa adanya kekerasan, membangun tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK), serta mengikutsertakan komunitas sekolah, termasuk orang tua dan wali murid. Di bidang pendidikan, satuan pendidikan melakukan pembelajaran penguatan karakter, sosialisasi, dan kampanye. Di bidang sarana dan prasarana, satuan pendidikan berkewajiban menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang aman dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas serta saluran pengaduan (Fahham, 2024).

Pada bukunya dengan judul “Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah”, (Mulyasa dalam (Purnawati, 2020)) mengatakan bahwa kepala sekolah berperan dan bertugas sebagai educator, manajer, administrator, innovator, motivator, supervisor, serta sebagai leader. Sebagai seorang edukator atau pendidik, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah memiliki dampak pada pertumbuhan siswa karena ada empat aspek penting dalam pengajaran yang harus diperhatikan dan ditanamkan oleh para pendidik kepada para siswanya, yaitu perkembangan moral, fisik, mental, dan artistik. Sebagai manajer, kepala sekolah memiliki tanggung jawab termasuk

mengawasi pengembangan kurikulum serta sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas. Menjadi kepala sekolah menyiratkan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab utama untuk mengerjakan tugas-tugas administratif di sekolah. Sebagai pelopor inovasi dan perubahan di kelas merupakan tanggung jawab utama kepala sekolah dalam rangka meningkatkan standar pendidikan dan menghadapi tantangan baru.

Kekerasan pada siswa terjadi pada SMPN 1 Denpasar, selama bulan September hingga November 2024 kekerasan di SMPN 1 Denpasar tercatat sebanyak 34 kasus dengan berbagai jenis kekerasan yang utamanya terjadi antara siswa dengan siswa. Maka dari itu, SMPN 1 Denpasar salah satu sekolah yang ditunjuk oleh Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) untuk membuat sekolah ramah anak. Pada pembuatan sekolah ramah anak, salah satu arahan LPKRA adalah dengan menciptakan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Selain itu, dasar pembentukan TPPK di SMPN 1 Denpasar merupakan implementasi dari Permendikbud No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Surat keputusan TPPK SMPN 1 Denpasar Nomor 421.3/1588B/SMPN.1/DPS/2023 terbit pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan tanggal berakhirnya surat keputusan pada 09 Oktober 2025 dan beranggotakan sembilan orang yaitu tujuh orang guru dan tenaga kependidikan serta dua orang komite sekolah. Berdasarkan hasil studi pendahuluan bersama koordinator TPPK, kepala SMPN 1 Denpasar berperan penting dalam TPPK yaitu sebagai penanggung jawab tertinggi keputusan dan kebijakan sekolah, koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat termasuk orang tua siswa, dan memberikan masukan, dukungan, serta motivasi untuk program – program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin meneliti peran kepala sekolah dalam berjalannya program – program yang sudah tercantum pada program kerja tahunan sekolah dengan berjudul “Peran Kepala

Sekolah Dalam Implementasi Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan (TPPK) Sebagai Tindakan Preventif Kekerasan di SMPN 1 Denpasar” yang difokuskan pada peran kepala sekolah yaitu peran edukator dan manajer kepala sekolah dalam pembentukan tim TPPK di SMPN 1 Denpasar serta dampak keberadaan TPPK terhadap iklim sekolah dan kasus kekerasan di lingkungan sekolah.

METODE

Penelitian ini berjudul “Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai Tindakan Preventif Kekerasan di SMPN 1 Denpasar” dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan menekankan pada interaksi antara peneliti dan peristiwa yang diteliti, penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah guna memahami fenomena di lapangan dalam konteks sosial yang alamiah (Herdiansyah, 2010). Dalam studi kasus ini, peneliti akan melihat suatu hal yang terjadi di SMPN 1 Denpasar yang kemudian dipelajari secara mendalam terkait latar belakang, kondisi serta interaksi yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Denpasar yang beralamatkan di Jl. Surapati No.2 Denpasar, Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu mulai tanggal 14 Oktober 2024 – 14 November 2024 dan 01 April 2025 – 30 Mei 2025. SMPN 1 Denpasar merupakan sekolah yang ditunjuk oleh Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) untuk menciptakan sekolah ramah anak. Menurut arahan LPKRA, dalam menciptakan sekolah ramah anak, salah satunya melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Sumber Data

Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer terdapat informan kunci, yaitu kepala sekolah, kemudian didukung dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), serta guru menjadi

sumber data primer dalam pembuktian peran kepala sekolah dalam implementasi TPPK sebagai tindakan preventif kekerasan di sekolah. Buku, artikel, dan jurnal tentang peran kepala sekolah dalam implementasi TPPK sebagai tindakan preventif kekerasan di sekolah merupakan contoh data sekunder yang mendukung kebutuhan data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Wawancara

Yang menjadi dasar metode pengumpulan data ini ialah laporan pribadi (self-report) atau paling tidak pada keyakinan dan pengetahuan individu (Sugiyono, 2013). Oleh karena itu, melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih detail tentang cara partisipan menafsirkan situasi dan peristiwa, yang mungkin tidak bisa diungkap hanya melalui observasi.

2. Observasi

Sebagai metode pengumpulan data, observasi mengharuskan peneliti untuk mengunjungi tempat kejadian secara pribadi untuk melihat isu-isu yang berhubungan dengan ruang, pelaku, aktivitas, benda-benda di sekitar, waktu, dan peristiwa (Sugiyono, 2013).

3. Studi Dokumentasi

Rekaman peristiwa yang sudah terjadi disebut dokumen. Tulisan, foto, atau kreasi monumental seseorang dapat dianggap sebagai dokumen. Temuan penelitian yang didasarkan pada observasi atau wawancara akan memiliki kredibilitas yang lebih besar jika didukung oleh otobiografi dan catatan pribadi tentang masa kecil, sekolah, pekerjaan, dan kehidupan masyarakat (Sugiyono, 2013).

Teknik Analisis Data

Menurut (Miles et al., 2014), mengumpulkan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data merupakan kegiatan pada analisis data.

1. Data Collections

Untuk mengumpulkan data, semua informasi yang dapat diakses dicatat

secara obyektif, dengan mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari observasi lapangan dan temuan wawancara.

2. Data Condensation

Proses memilih, memusatkan, merampingkan, dan memusatkan data untuk menekankan informasi yang signifikan dikenal sebagai kondensasi data. Mengurangi volume dan elemen-elemen yang ada adalah bagian dari proses ini. Karena data tersebut tidak diperlukan untuk penelitian, maka informasi yang tidak perlu atau tidak tepat harus dibuang.

3. Data Display

Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan format tes naratif. Visualisasi data akan membantu merencanakan pekerjaan kedepannya berdasarkan pengetahuan yang dikumpulkan dan membuat situasi lebih mudah dipahami.

4. Conclusion Drawing/Verification

Jika tidak ada cukup bukti untuk menjamin langkah pengumpulan data selanjutnya, temuan awal akan diperbarui. Namun, saat peneliti ke lapangan kembali untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut, hasilnya dapat dipercaya asalkan temuan awal didukung oleh data yang dapat dipercaya dan konsisten.

Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan validitas, reliabilitas, dan objektivitas.

1. Uji Kredibilitas

Dalam uji kredibilitas ini, triangulasi adalah tahap membandingkan informasi dari beberapa sumber di waktu yang berbeda dan menggunakan metode yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi informasi yang didapat dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi teknik adalah metode yang digunakan untuk mengukur konsistensi data dengan membandingkan informasi dari sumber yang sama melalui berbagai metode.

Member check adalah tahap verifikasi data yang dikumpulkan oleh peneliti kepada pemberi data (informan) untuk memastikan untuk memastikan kebenaran dan keakuratan informasi tersebut.

2. Uji Validitas Eksternal (*Transferability*)
Menurut para peneliti naturalistik, sejauh mana temuan bisa diterapkan dalam lingkup dan keadaan sosial yang berbeda tergantung pada pengguna. Maka dari itu, peneliti perlu untuk menyajikan penjelasan secara menyeluruh, jelas, metodis, dan dapat dipercaya dalam laporannya sehingga orang lain dapat menangkap temuan penelitian kualitatif dan ada kesempatan untuk mengimplementasikan temuan tersebut.
3. Uji Reliabilitas (*Dependability*)
Untuk melakukan uji dependability dalam penelitian kualitatif, proses penelitian yang lengkap diaudit. Meskipun dapat menyediakan data, peneliti sering kali tidak melakukan proses penelitian di lapangan. Peneliti yang seperti ini perlu diperiksa dependabilitasnya.
4. Uji Objektivitas (*Confirmability*)
Menurut penelitian kualitatif, penelitian dianggap objektif jika temuan-temuannya diterima secara luas dan uji konfirmabilitas dan dependabilitas dapat dilakukan secara bersamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Peran Kepala Sekolah sebagai Edukator

a. Pembinaan Mental

- Peran kepala sekolah yaitu mengingatkan siswa tidak melakukan kekerasan dan mengingatkan untuk melaporkan tindakan kekerasan.
- Menginstruksikan guru BK, wali kelas, dan tim PKK untuk melakukan pendampingan psikologis. Layanan pendampingan ini tersedia di Ruang Hati (ruangan TPPK) maupun di ruang BK.
 - o TPPK: memimpin dan mengawasi program pencegahan serta penanganan kekerasan di

sekolah melalui koordinasi dengan seluruh pihak terkait, serta memastikan pelaksanaan prosedur penanganan kekerasan berjalan sesuai ketentuan.

- o BK: mengawasi pelaksanaan prosedur penanganan kekerasan di sekolah, memberikan konseling serta pelatihan tentang nilai-nilai perdamaian dan etika sosial, serta memfasilitasi penyelesaian konflik antar siswa secara damai.
- o Wali kelas: mengawasi perilaku siswa di kelas untuk mendeteksi potensi kekerasan atau perundungan, serta berkoordinasi dengan orang tua dan Guru BK dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya perilaku anti-kekerasan.
- Pendampingan psikologis diberikan saat siswa membutuhkan pendampingan, siswa bercerita mengenai permasalahannya, dan siswa mengalami kasus kekerasan.
- Kepala sekolah menjamin kerahasiaan identitas pelaku dan korban, penanganan kasus berat dengan mendatangkan orang tua ke sekolah untuk penyelesaian kasus, dan pemberian masukan pada kegiatan role play saat mata pelajaran BK yang bertema penanganan dan pencegahan kasus kekerasan.

b. Pemberian Nasihat

- Diberikan saat upacara bendera, rapat koordinasi, dan keliling ke kelas – kelas.
- Mencakup kedisiplinan, tata tertib sekolah, larangan diskriminasi, pentingnya saling menghargai dan tidak merundung teman, serta pentingnya tidak melakukan kekerasan di lingkungan sekolah.
- Pendekatan yang digunakan cenderung santai namun tegas, seperti melalui cerita dan dialog langsung di dalam kelas.

c. Pembinaan Fisik

- Kepala sekolah mendampingi kegiatan baris - berbaris, pramuka, outbound, senam rutin, dan ekstrakurikuler fisik lainnya.
- Kepala sekolah kerja sama dengan melibatkan pihak eksternal (tentara dan pembina ekskul).
- Kegiatan pembinaan fisik yaitu MPLS, pelantikan OSIS, upacara bendera, dan kegiatan pelibatan pihak eksternal.
- Tujuan pembinaan fisik ini adalah membentuk solidaritas, empati, dan rasa saling peduli antar siswa sebagai langkah pencegahan kekerasan.

d. Kolaborasi Tim

- Kepala sekolah menyetujui berkolaborasi dan kerja sama dengan psikolog atau konselor dan dokter jaga yang setiap hari ada di UKS.
- Kepala sekolah berkolaborasi dengan puskesmas yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2024.
- Yang terlibat dalam pemeriksaan kesehatan yaitu kepala sekolah bersama tim PPK, dokter, dan petugas kesehatan.

2. Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer

a. Perencanaan

- Kepala sekolah tidak masuk dalam tim tetapi tetap sebagai penanggung jawab tertinggi sesuai Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023. Kepala sekolah menunjuk koordinator TPPK (waka kesiswaan) dan membagi tugas menjadi enam bidang kerja.
- Yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, dan orang tua siswa yang diwakilkan komite sekolah.
- Kepala sekolah merencanakan budaya anti-kekerasan di sekolah yaitu berperan aktif melalui pengawasan terhadap kebijakan internal, penguatan komitmen bersama, dan peningkatan

kesadaran pelaporan kekerasan.

b. Pengorganisasian

- Kepala sekolah mengorganisasikan pelaksanaan dan keberlanjutan program serta keputusan penting dengan rapat.
- Kepala sekolah mengorganisasikan kegiatan parenting yang bekerja sama dengan orang tua siswa dan mendampingi siswa yang terlibat dalam kasus.

c. Pelaksanaan

- Kepala sekolah memberikan arahan untuk menempelkan sistem pengaduan SIGAP, penyediaan sarana (ruang Hati), dan pelatihan bagi anggota TPPK.
- Dukungan kepala sekolah dalam pelaksanaan TPPK yaitu melobi komite sekolah untuk membantu pendanaan dan mendukung pelatihan.
- Kepala sekolah berperan dalam situasi berat dengan menyelesaikan kasus antar siswa, pemanggilan orang tua, dan pendampingan ke psikolog atau konselor.
- Pembuatan MoU contohnya dengan Kisaran, PKBI, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang ada di Kota Denpasar.

d. Evaluasi

- Yang terlibat yaitu kepala sekolah bersama guru BK dan tim TPPK.
- Evaluasi ini meliputi hasil audit ruangan dan administrasi, perubahan tata tertib (seperti penghapusan sistem poin), serta perbaikan fasilitas ruang BK.
- Kepala sekolah menindaklanjuti secara bertahap dan kesinambungan program anti-kekerasan melalui pemeriksaan kelengkapan fasilitas seperti ruangan pelaporan, kelengkapan administrasi (buku tamu dan buku catatan), pemantauan pelaksanaan program, dan sosialisasi melalui

- media seperti poster dan barcode pelaporan.

3. Dampak Implementasi TPPK

a. Keterbukaan Siswa

- Sistem pelaporan kekerasan yang anonim dan berbasis digital (melalui link) dengan bentuk poster yang dipasang di sudut sekolah.
- Siswa sudah mulai berani untuk melapor dan mengakses SIGAP.

b. Iklim Sekolah

- Diskusi antar guru mengenai iklim sekolah bahwa sebanyak 34 siswa mulai melaporkan kekerasan melalui SIGAP (menunjukkan keaktifan TPPK dan pemanfaatan sistem daring).
- Kepala sekolah memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dengan transparan dan melibatkan seluruh pihak.
- Dampak pada potensi lingkungan sekolah yaitu perencanaan konselor sebaya untuk jangka waktu yang akan datang.

Pembahasan

1. Peran Kepala Sekolah sebagai Edukator

a. Pembinaan Mental

Peran kepala sekolah yang juga dalam pembinaan mental yaitu kepala sekolah berperan dalam menjamin kerahasiaan identitas pelaku dan korban seperti yang dipaparkan pada Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023 Pasal 71 bahwa mendukung pelaksanaan perlindungan bagi anak dibawah umur yang dilaporkan serta penyelesaian kasus dan perlindungan bagi saksi, korban, dan pelapor. Dalam penanganan kasus berat, kepala sekolah mengundang orang tua dalam penyelesaian kasus. Hal tersebut sejalan dengan (Cornell et al., 2015) bahwa kepala sekolah harus mengikutsertakan orang tua dalam proses penyelesaian kasus atau masalah dan memilah kasus dengan cermat serta mengambil tindakan yang tepat terhadap pelaku. Selain dalam penanganan kasus berat dan pendampingan psikologis, dalam mata

Pelajaran Bimbingan Konseling, kepala sekolah memberikan contoh pada kegiatan role play bersama. Pada role play tersebut kepala sekolah memberikan masukan mengenai korban dan pelaku kekerasan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Maemunah & Karneli, 2021) bahwa dengan menggunakan teknik role play atau bermain peran, pelaku kekerasan ditempatkan pada posisi korban untuk mengalami apa yang dialami korban dan membantunya memahami bagaimana tindakannya merusak perasaan korban dan menghindari melakukannya lagi.

b. Pemberian Nasihat

Nasihat kepala sekolah bukan hanya bersifat normatif, tetapi menjadi strategi komunikasi moral yang memperkuat karakter siswa dalam membangun budaya anti kekerasan di sekolah. Pada saat upacara bendera, rapat koordinasi, dan keliling ke kelas – kelas kepala sekolah memberikan nasihatnya mengenai kedisiplinan, tata tertib sekolah, larangan diskriminasi, dan pentingnya saling menghargai dan tidak merundung teman. Menurut (Syukri & Harapah, 2021), dalam pemberian nasihat, kepala sekolah harus memasang mimik wajah tegah dengan memberikan intonasi yang baik saat memberikan nasihat untuk mencapai hasil komunikasi yang diinginkan sehingga siswa dan guru dapat memahami nasihat yang diberikan.

c. Pembinaan Fisik

Pembinaan fisik yang diberikan oleh kepala sekolah berbentuk kegiatan yang meningkatkan kebugaran siswa yaitu kegiatan baris - berbaris, pramuka, outbound, senam rutin, dan ekstrakurikuler fisik lainnya. Kegiatan dilakukan secara fleksibel, terutama pada saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), pelantikan OSIS, dan saat upacara bendera yang juga melibatkan pihak eksternal seperti tentara dan pembina

ekstrakurikuler paskibraka. Tujuan pembinaan fisik ini adalah membentuk solidaritas, empati, dan rasa saling peduli antar siswa sebagai langkah pencegahan kekerasan. Dalam pembinaan fisik ini, sejalan dengan (Rahmawati & Hendriani, 2024) bahwa kepala sekolah mendorong dan memberikan kesempatan kepada guru dan siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembinaan fisik di sekolah dan dalam lingkungannya masing-masing, meskipun kepala sekolah tidak selalu berpartisipasi secara langsung.

d. Kolaborasi Tim

Dalam kolaborasi tim, kepala sekolah menyetujui berkolaborasi dan kerja sama dengan psikolog atau konselor untuk menangani kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh sekolah dan kolaborasi dengan dokter jaga yang setiap hari ada di UKS. Kepala sekolah berkolaborasi dengan puskesmas untuk pemeriksaan anemia, mata, telinga dan lainnya terutama untuk siswa perempuan yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2024. Yang terlibat dalam pemeriksaan kesehatan yaitu kepala sekolah bersama tim PPK, dokter, dan petugas kesehatan melakukan pemeriksaan ke kelas – kelas. Hal tersebut sejalan dengan (Ghofur & Zahrotus Sa'ada, 2021) sebaik apapun seorang kepala sekolah menjalankan sekolah, jika sekolah tidak memiliki kerja sama yang baik dengan pihak-pihak di sekitarnya yang dapat memberikan dampak positif bagi sekolah, maka hasilnya akan nihil. Kerja sama dengan guru, komite, dan instansi terkait merupakan salah satu kunci keberhasilan lembaga pendidikan. Tindakan apapun yang berusaha mewujudkan kegiatan yang dilakukan akan gagal tanpa adanya kerja sama yang kuat.

2. Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer

a. Perencanaan

Dalam pencegahan dan

penanggulangan kekerasan, kepala SMPN 1 Denpasar membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Pada pembentukan TPPK, kepala SMPN 1 Denpasar mengacu pada Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Sesuai dengan aturan tersebut, TPPK harus terdiri dari anggota yang berjumlah ganjil dengan pendidik yang bukan kepala satuan pendidikan, anggota komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali siswa, dan perwakilan tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi (Permendikbudristek, 2023). Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan di SMPN 1 Denpasar, kepala sekolah tidak tergabung didalam tim tetapi tetap menjadi penanggung jawab tertinggi dalam TPPK. Kepala sekolah menunjuk waka kesiswaan untuk menjadi koordinator TPPK dan melibatkan orang tua yang diwakilkan oleh komite sekolah untuk menjadi anggota TPPK sesuai dengan aturan Permendikbud Ristek tersebut. Kepala sekolah berperan aktif melalui pengawasan terhadap kebijakan internal, penguatan komitmen bersama, dan peningkatan kesadaran pelaporan kekerasan. Hal tersebut sejalan penelitian yang dilakukan oleh (Selian & Restya, 2024) bahwa tujuan dari kampanye anti-perundungan adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan suportif yang bebas dari kekerasan (perundungan dan pelecehan).

b. Pengorganisasian

Menurut (Nurilawati et al., 2020) dalam pengorganisasian kepala sekolah mampu mengatur

dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan utama di sekolah, khususnya pada penelitian ini yaitu tujuan pencegahan dan penanganan kekerasan. Peran kepala SMPN 1 Denpasar pada pengorganisasian ini melakukan koordinasi dengan pihak – pihak penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan keberlanjutan program, terlibat aktif dalam mendampingi siswa yang terlibat kasus, dan berkoordinasi untuk membuat program parenting orang tua siswa yang bertujuan juga untuk upaya pencegahan kekerasan yang berkelanjutan dan menjadi bagian dari budaya positif sekolah. Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah mampu mengorganisasi tim dan membangun keterlibatan orang tua sebagai bentuk partisipasi aktif dalam implementasi program TPPK. Dalam hal koordinasi, kepala sekolah tidak mengambil keputusan sepihak, tetapi tetap dikomunikasikan dengan tim.

c. Pelaksanaan

Kepala sekolah memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan program dengan cara mendukung sumber daya, sistem pelaporan, dan pelatihan sebagai bentuk respons manajerial terhadap kebutuhan lapangan. Mengenai hal tersebut, kepala SMPN 1 Denpasar mendukung kebijakan TPPK melalui sistem pengaduan SIGAP yang ditempelkan pada sudut – sudut sekolah untuk memberikan rasa aman kepada siswa yang ingin melaporkan tindakan kekerasan. Sekolah harus membuat sistem pengaduan yang aman dan rahasia bagi anak – anak yang ingin melaporkan kejadian kekerasan yang dialami atau disaksikan di lingkungan sekolah (Selian & Restya, 2024). Selain sistem pelaporan, dibidang sarana dan prasarana, satuan pendidikan

berkewajiban menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang aman dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas serta saluran pengaduan (Fahham, 2024). Kepala sekolah menyediakan sarana fisik berupa kesiapan ruangan TPPK yang dinamakan Ruang Hati.

d. Evaluasi

Kepala sekolah menjalankan peran evaluatif secara aktif dan tanggap, menjadikan hasil evaluasi sebagai acuan pengembangan kebijakan, fasilitas, dan keberlanjutan program. Evaluasi program TPPK dilakukan secara berkala oleh kepala sekolah bersama guru BK dan TPPK. Evaluasi ini meliputi hasil audit ruangan dan administrasi, perubahan tata tertib (seperti penghapusan sistem poin), serta perbaikan fasilitas ruang BK. Hal tersebut sejalan dengan (Ambawani et al., 2024) bahwa dalam menentukan tantangan dan masalah yang muncul di lapangan dan mengidentifikasi solusi, evaluasi tim pencegahan dan penanganan kekerasan menggunakan sistem Forum Group Discussion (FGD). Maka dari itu, kepala sekolah menindaklanjuti secara bertahap hasil evaluasi dengan selalu di follow-up. Kepala sekolah juga memastikan kesinambungan program anti-kekerasan melalui pemeriksaan kelengkapan fasilitas seperti ruangan pelaporan, kelengkapan administrasi (buku tamu dan buku catatan), pemantauan pelaksanaan program, dan sosialisasi melalui media seperti poster dan barcode pelaporan.

3. Dampak Implementasi TPPK

a. Keterbukaan Siswa

Implementasi TPPK berhasil menciptakan saluran aman dan rahasia bagi siswa, didukung oleh

pendekatan kepala sekolah yang terbuka, tegas, namun empatik. Keterbukaan siswa pelapor merupakan dampak sistem pelaporan kekerasan yang anonim dan berbasis digital (melalui link) dengan bentuk poster yang dipasang di sudut sekolah. Se jauh adanya keberadaan TPPK, siswa sudah mulai berani untuk melapor dan mengakses SIGAP. Hal tersebut sejalan dengan (Tanton et al., 2023) bahwa pengungkapan diri siswa tentang kekerasan emosional dan fisik di sekolah meningkat ketika kuesioner anonim digunakan. Hal ini diartikan bahwa siswa lebih bersedia mengungkapkan kasus kekerasan pelaporan dirahasiakan.

b. Iklim Sekolah

Data menunjukkan iklim sekolah menjadi lebih positif. Kepala sekolah terlibat langsung dalam penyelesaian kasus. Guru BK bahkan mengembangkan program konselor sebaya. Diskusi antar guru mengenai iklim sekolah bahwa pelaporan kekerasan meningkat seiring dengan keaktifan TPPK dan pemanfaatan sistem pelaporan daring. Kepala sekolah memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dengan transparan dan melibatkan seluruh pihak, sehingga tercipta iklim sekolah yang lebih terbuka, aman, dan minim kasus bullying. Hal tersebut sejalan dengan (Cornell et al., 2015) bahwa dalam menangani kasus kekerasan, sekolah harus memiliki aturan yang kuat, jelas, dan efektif untuk mencegah dan memberantasnya. Kebijakan tersebut harus berisi program proaktif dalam mencegah kekerasan, sanksi yang tegas bagi pelaku, dukungan bagi korban, dan program edukasi mengenai kekerasan untuk semua anggota sekolah. Dengan demikian, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan bebas dari kekerasan.

PENUTUP

Simpulan

1. Peran Kepala Sekolah sebagai Edukator

(a) Kepala sekolah berperan dalam pembinaan mental yaitu mengingatkan siswa tidak melakukan kekerasan dan pelaporan, layanan konseling, kerahasiaan identitas, dan peran dalam role play. (b) Kepala sekolah berperan dalam pemberian nasihat yaitu saat upacara, rapat, dan keliling kelas dengan pendekatan santai-tegas. (c) Kepala sekolah berperan dalam pembinaan fisik yaitu kegiatan baris – berbaris, pramuka, outbound, senam rutin, dan ekstrakurikuler. (d) Kepala sekolah berperan dalam kolaborasi tim yaitu dengan bekerja sama dengan psikolog, dokter UKS, dan puskesmas.

2. Peran kepala Sekolah sebagai Manajer

(a) Kepala sekolah berperan dalam perencanaan yaitu penunjukan koordinator TPPK dan budaya anti-kekerasan. (b) Kepala sekolah berperan dalam pengorganisasian yaitu melalui rapat, kegiatan parenting, dan pendampingan siswa. (c) Kepala sekolah berperan dalam pelaksanaan yaitu dengan mendukung SIGAP, ruang Hati, pelatihan, dan MoU dengan pihak eksternal. (d) Kepala sekolah berperan dalam evaluasi yaitu dengan hasil audit, perbaikan fasilitas, dan evaluasi program.

3. Dampak Implementasi TPPK

(a) Dampak dalam keterbukaan siswa yaitu siswa berani melapor pada sistem pelaporan anonim SIGAP. (b) Dampak dalam iklim sekolah yaitu dengan diskusi guru siswa sudah berani melapor dan mengakses SIGAP, tindak lanjut laporan kekerasan, perencanaan konselor sebaya, dan transparansi kasus kekerasan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan untuk pihak sekolah yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Sekolah

Disarankan agar kepala sekolah mengoptimalkan perannya sebagai manajer dan edukator dalam pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), khususnya dalam konteks kebijakan dan pengambilan keputusan. Sebagai manajer, kepala sekolah perlu menyusun strategi

pembentukan tim secara sistematis dan sesuai dengan regulasi, seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Pengambilan keputusan terkait struktur tim, pembagian tugas, dan mekanisme kerja harus didasarkan pada kebutuhan sekolah dan bersifat solutif. Dalam peran sebagai edukator, kepala sekolah diharapkan membangun budaya sekolah yang aman dan inklusif melalui pembinaan, sosialisasi, dan edukasi nilai-nilai anti kekerasan. Pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan, serta evaluasi berkala berbasis data, juga perlu dilakukan agar kebijakan yang diterapkan efektif dan mendapat dukungan dari seluruh warga sekolah. Dengan peran yang optimal, kepala sekolah dapat memperkuat fungsi TPPK sebagai upaya preventif yang berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman.

2. **Bagi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)**

Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) lebih proaktif dalam merancang dan melaksanakan program-program yang tidak hanya berfokus pada penanganan kasus kekerasan, tetapi juga pada upaya preventif yang menyentuh langsung kebutuhan dan kenyamanan peserta didik. Anggota TPPK perlu mengembangkan program yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan, seperti kampanye anti kekerasan, forum siswa, konseling terbuka, atau kegiatan penguatan karakter yang melibatkan siswa sebagai subjek utama.

3. **Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan**

Dalam konteks pembelajaran, guru diharapkan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan antikekerasan melalui metode yang interaktif dan membangun kedekatan emosional dengan siswa. Tenaga kependidikan juga memegang peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, baik melalui pelayanan administratif maupun interaksi harian dengan siswa.

4. **Bagi Siswa**

Siswa diharapkan terus membangun keberanian dan kepercayaan diri dalam melaporkan segala bentuk kekerasan yang dialami atau disaksikan. Disarankan juga agar siswa didorong untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan suportif melalui penguatan peran sebagai konselor sebaya. Peran ini penting sebagai

jembatan komunikasi antara teman sebaya dan pihak sekolah, khususnya dalam mengenali, mencegah, dan merespons potensi kekerasan di lingkungan sekolah.

5. **Bagi Orang Tua**

Partisipasi aktif orang tua dalam kegiatan parenting dan koordinasi dengan pihak sekolah sangat membantu dalam mendukung program TPPK. Dengan menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan rumah, upaya pencegahan kekerasan dapat dilakukan lebih menyeluruh dan konsisten.

6. **Bagi Peneliti Lain**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan metode lainnya seperti pengembangan buku pedoman mengenai implementasi TPPK di sekolah lain, baik di jenjang yang sama maupun berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambawani, C. S. L. A., Kusuma, T. M. M., Kusumastuti, N. A., Sutama, & Fathoni, A. (2024). *MANAGEMEN KEAMANAN SEKOLAH ANTI BULLYING ATAU KEKERASAN DI SMA NEGERI 6 SURAKARTA*. *Edunomika*, 08(02).
- Cornell, D., Shukla Kathan, & Konold, T. (2015). Peer victimization and authoritative school climate: A multilevel approach. *Journal of Educational Psychology*, 107(4), 1186–1201.
- Fahham, A. M. (2024). *KEKERASAN PADA ANAK DI SATUAN PENDIDIKAN*. In *idntimes.com*, 1 Oktober. <https://pusaka.dpr.go.id>
- Ghofur, M. A., & Zahrotus Sa'ada, L. (2021). *Strategi Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Mutu Pendidikan*. 109(2). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jmpi/index>
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu - ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Maemunah, S., & Karneli, Y. (2021). Teknik Role Playing dalam Mengurangi bullying di SMP Muhammadiyah 3 Jakarta. *Prophetic Guidance and Counseling Journal*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.32832/pro-gcj.v2i1.4729>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (Third Edition). SAGE Publications.
- Nurilawati, B. S., Novianty, D., Fitria, H., M, H., Faisal, F., Purwani Puji, U., Marisi, B.,

- Acai, S., Abdul, R., Hegar, H., Rhini, F., Kadir, S., Fahrina Yustiasari, L., Corry, Y., Heldy Vanni, A., & Karmila, L. (2020). *MENJADI KEPALA SEKOLAH PROFESIONAL ERA REVOLUSI 4.0* (R. Abdul, Ed.; Cetakan 1). Zahir Publishing.
- Permendikbudristek. (2023). *Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023*.
- Purnawati, S. (2020). *PERAN KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA di MTs MATHLA'UL ANWAR LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG* Skripsi.
- Rahmawati, S., & Hendriani, S. (2024). Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru SMPN 6 Sawahlunto. *Journal on Education*, 07(01), 2039–2045.
- Selian, S. N., & Restya, W. P. D. (2024). Peran Kepala Sekolah dalam Mengatasi Bullying di Sekolah. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(2), 531–539. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i2.751>
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Syukri, M., & Harapah, A. H. J. (2021). IMPLEMENTASI BENTUK KOMUNIKASI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA INSAN BATANG KUIS. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/benchmarking>
- Tanton, C., Bhatia, A., Pearlman, J., & Devries, K. (2023). Increasing disclosure of school-related gender-based violence: lessons from a systematic review of data collection methods and existing survey research. *BMC Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15526-w>